PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :

Titania Audrey Al Fikriyyah

NIM : 31402300211

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG

2025

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :
Titania Audrey Al Fikriyyah
NIM : 31402300211

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

SKRIPSI

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun Oleh :
Titania Audrey Al Fikriyyah
NIM : 31402300211

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025
Pembimbing,

Hani Werdi Apriyanti, SE,MSi, Ak,CA
NIK. 211414026

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :
Titania Audrey Al Fikriyyah
NIM : 31402300211

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 26 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,

Hani Werdi Apriyanti, SE,MSi, Ak,CA
NIK 211414026

Penguji,

Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si., CGAA
NIK 211421032

Penguji 2,

Dian Essa Nugrahini, SE., M.Ak., Ak
NIK 211421031

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP, PhD
NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Titania Audrey Al Fikriyyah
NIM	: 31402300211
Program Studi	: S-1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

"Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro".

Merupakan karya penelitian sendiri tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,

Titania Audrey Al Fikriyyah

NIM. 31402300211

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi berganda melalui analisis data time series dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2019–2023. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan kemampuan menjelaskan variasi PAD sebesar 93,2%. Temuan ini memperkuat teori desentralisasi fiskal bahwa pelimpahan kewenangan pajak daerah dapat memperkuat keuangan daerah. Studi ini merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memprioritaskan optimalisasi BPHTB dan tetap memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2.

Kata Kunci: *PBB-P2, BPHTB, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, keuangan daerah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) on Regional Original Income (PAD) in Bojonegoro Regency. This study uses a quantitative method with a multiple regression approach through time series data analysis from the Bojonegoro Regency Regional Revenue Agency in 2019–2023. The results of the regression analysis show that PBB-P2 and BPHTB have a positive and significant effect on PAD, with the ability to explain variations in PAD of 93.2%. This finding strengthens the theory of fiscal decentralization that the delegation of regional tax authority can strengthen regional finances. This study recommends that the Bojonegoro Regency Government prioritize the optimization of BPHTB and continue to strengthen the PBB-P2 intensification and extensification strategy.

Keywords: PBB-P2, BPHTB, Local Own-Source Revenue, local tax, local finance

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **"Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro".**

Penyusunan skripsi ini merupakan prasyarat kelulusan program S1 Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamba-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP, PhD selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Hani Werdi Apriyanti, SE,MSi, Ak,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dari mulai penyusunan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si., CGAA dan Ibu Dian Essa Nugrahini, SE., M.Ak., Ak selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah yang telah memberikan bekal ilmu berharga untuk masa depan penulis.
7. Ibu Mariana Indah Koesmeiwati selaku orangtua penulis dan Tsaniya Ahda Azzahra selaku saudara penulis serta yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan alumni PKN STAN di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang turut membersamai penulis dalam proses meraih gelar sarjana ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan penyusunan skripsi ini. Setiap bentuk saran membangun akan diterima dengan penuh penghargaan. Penulis berharap besar agar karya penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif serta memperkaya khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Mei 2025

Penulis,

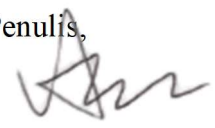

Titania Audrey Al Fikriyyah

NIM. 31402300211

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN…… ii

HALAMAN PERNYATAAN……iv

ABSTRAK……v

***ABSTRACT*……...vi**

KATA PENGANTAR…….. vii

DAFTAR ISI…….. ix

DAFTAR TABEL…… xiii

DAFTAR GAMBAR…….. xiv

DAFTAR LAMPIRAN…… xv

BAB I PENDAHULUAN……... 16

1.1 LATAR BELAKANG……16

1.2 RUMUSAN MASALAH 25

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 26

1.4 TUJUAN PENELITIAN 27

1.5 MANFAAT PENELITIAN.....27

BAB II TINJAUAN LITERATUR…… 28

2.1 LANDASAN TEORI 28

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal 28

2.2 VARIABEL PENELITIAN 30

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 30

2.2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan..... 32

2.3 PENELITIAN TERDAHULU..... 35

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS..... 37

2.5 KERANGKA PENELITIAN..... 39

BAB III METODE PENELITIAN..... 40

3.1 JENIS PENELITIAN 40

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 40

3.2.1 Populasi Penelitian..... 40

3.2.2 Sampel Penelitian..... 41

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA 42

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 42

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR 43

3.6 METODE ANALISIS DATA 46

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif..... 46

3.6.2 Uji Asumsi Klasik..... 46

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda..... 49

3.6.4 Uji Kelayakan Model..... 50

3.6.4.1 Uji F…… 50

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi…….. 51

3.6.5 Uji Parsial (Uji t) ……51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……52

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 52

4.1 Struktur Organisasi Bapenda..... 53

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 55

4.3 Uji Asumsi Klasik 57

4.3.1 Hasil Uji Normalitas……57

4.3.2 Hasil Uji Autokorelasi…… 60

4.3.3 Hasil Uji Multikolinearitas…… 61

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastitsitas…… 62

4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 63

4.5 Hasil Uji Kelayakan Model..... 65

4.5.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)…… 65

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)…….65

4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Analisis Data... 66

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 67

4.7.1 Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro……. 67

4.7.2 Pengaruh BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro……..70

BAB V PENUTUP……73

5.1 Kesimpulan 73

5.2 Implikasi..... 74

5.3 Keterbatasan Penelitian..... 74

5.4 Agenda Penelitian Mendatang 75

DAFTAR PUSTAKA……76

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 : Data PAD, PBB-P2, BPHTB, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Jombang, dan Nganjuk Tahun 2022……...……..20
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu……...35
Tabel 3.1 : Variabel dan Indikator……....44
Tabel 3.2 : Pengambilan Keputusan Durbin Watson……..…....48
Tabel 4.1 : Hasil Analisis Deskriptif…….55
Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas ……58
Tabel 4.3 : Hasil Uji Normalitas Kedua……..……..59
Tabel 4.4 : Hasil Uji Autokorelasi……..……..…60
Tabel 4.5 : Hasil Uji Autokorelasi Kedua……..……..…60
Tabel 4.6 : Hasil Uji Multikolinearitas…….62
Tabel 4.7 : Hasil Uji Heteroskedastitsitas……....……63
Tabel 4.8 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda…….64
Tabel 4.8 : Hasil Uji Signifikansi Simultan……..65
Tabel 4.8 : Hasil Uji Koefisien Determinasi…….66
Tabel 4.8 : Hasil Uji t……66

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar Halaman

Gambar 1.1 : Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Pula Jawa Tahun 2022...……..19
Gambar 1.2 : Realisasi dari Target PBB-P2 dan BPHTB Kab. Bojonegoro…....23
Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian…….....39
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Bojonegoro…….……....54

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1 : Data PBB-P2, BPHTB & PAD Kab. Bojonegoro Tahun 2019-202..80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwasannya, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah selaras dengan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya pada sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwasannya pemerintahan daerah menerima kewenangan yang sangat luas dari pemerintah pusat guna mengatur serta mengelola sendiri urusan-urusan yang berada pada lingkup kewenangannya. Namun demikian, kewenangan berikut tak bersifat absolut sebab wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mengalihkan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selaras dengan asas otonomi, maka diberlakukanlah sistem desentralisasi guna memperlancar pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), politik (*political decentralization*),

serta fiskal (*fiscal decentralization*) ialah tiga kategori utama yang dengan cara konseptual bisa dibagi ke pada desentralisasi (Sidik 2002). Landasan legislatif yang penting bagi upaya desentralisasi fiskal Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. selaku bagian dari upaya guna mengoptimalkan otonomi daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah pusat mendelegasikan hak kepada pemerintah daerah guna memungut pajak serta retribusi lewat peraturan dimaksud. Diharapkan bahwasannya pengalihan kewenangan berikut akan mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dengan memaksimalkan potensi pajak serta retribusi saat ini, mendorong kemandirian pengelolaan keuangan di seluruh daerah, serta mengoptimalkan standar layanan publik. Hasilnya, pemerintah daerah lebih tidak bergantung secara fiskal pada transfer pemerintah pusat serta mempunyai lebih banyak peluang guna mendukung layanan serta pembangunan masyarakat dengan cara berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) ialah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari sumber yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, seperti pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah menyajikan kontribusi terbesar kepada PAD dari keempat komponen tersebut. Rerata kontribusi yang disumbang oleh pajak daerah kepada PAD kabupaten serta kota di

Indonesia ialah sejumlah 36%, berlandaskan Nasir (2019). Berbeda dengan komponen PAD lainnya, seperti retribusi daerah sejumlah 14% serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 31%.

Bergantung pada tingkat pemerintahan yang berwenang memungutnya, pajak daerah dilaksanakan dengan dua cara utama, yakni pajak daerah tingkat provinsi serta pajak daerah tingkat kabupaten ataupun kota. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Opsen Pajak MBLB. termasuk pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi. Pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral serta batuan bukan logam (MBLB), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak bumi serta bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Opsen PKB, serta Opsen BBNKB termasuk pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota.

PBB-P2 serta BPHTB ialah dua jenis pajak yang paling besar pengaruhnya kepada penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia di tahun 2020–2023, berlandaskan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). Kecuali untuk properti perkebunan, kehutanan, serta pertambangan, PBB-P2 dikenakan pada bangunan serta tanah yang dimiliki, dioperasikan, ataupun dipakai oleh orang ataupun badan usaha. Sementara itu, pembelian hak milik atas bangunan ataupun tanah dikenakan pungutan BPHTB.

Berlandaskan Badan Pusat Statistik (2024), rerata pertumbuhan sektor properti di Indonesia tumbuh positif sejumlah 2,8% selama tahun 2019-2023. Tumbuhnya sektor properti tersebut turut mendukung tingginya penerimaan PBB-P2 serta BPHTB. Hal tersebut juga mengakibatkan PBB-P2 serta BPHTB cukup resisten dalam menghadapi gejolak perekonomian. Berlandaskan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) dengan cara nasional, PBB-P2 serta BPHTB ialah dua pajak dengan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak daerah saat pandemi terjadi. Hal berikut juga dibuktikan oleh penelitian Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023) yang memperlihatkan pengaruh positif PBB-P2 serta BPHTB, dengan cara parsial serta simultan, kepada PAD di Kota Denpasar selama pandemi covid-19 terjadi. Situasi berikut memperlihatkan bahwasannya optimalisasi penerimaan PBB-P2 serta BPHTB bisa menjadi strategi efektif guna mengoptimalkan PAD serta menopang perekonomian daerah.

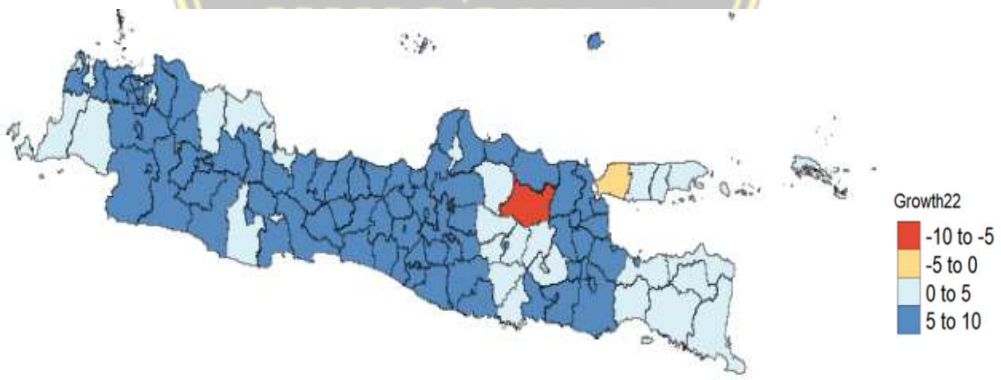

Gambar 1.1 Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Di tahun 2024, Kementerian Keuangan merilis distribusi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tahun 2022. dengan cara umum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sudah cukup baik, namun di Provinsi Jawa Timur masih ada beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur di tahun 2022 ialah sejumlah 5,34% dengan capaian tertinggi diraih oleh Kabupaten Tuban yakni sejumlah 8,88%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi terendah tercatat di Kabupaten Bojonegoro, yakni -6,16%. Wilayah di sekitar Kabupaten Bojonegoro justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif seperti Kabupaten Nganjuk 4,84%, Kabupaten Jombang 5,37%, serta Kabupaten Tuban 8,88%.

Tabel 1.1 : Data PAD, PBB-P2, BPHTB, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Jombang, serta Nganjuk Tahun 2022

Kabupaten	PAD	PBB-P2	BPHTB	Pertumbuh-an Ekonomi
Bojonegoro	804.007.473.048	44.951.159.924	24.143.114.660	-6,16%
Tuban	574.696.171.350	47.143.306.820	25.204.385.102	8,88%
Jombang	522.181.436.106	40.013.127.221	46.160.870.811	5,37%
Nganjuk	445.607.163.353	53.162.189.803	30.394.461.991	4,84%

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pertumbuhan perekonomian di kabupaten/kota se-Jawa Timur diberikan pengaruh dengan cara positif oleh PAD (Yasin, 2020). Berlandaskan publikasi data realisasi penerimaan daerah oleh masing-masing pemerintah daerah, Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan realisasi PAD yang cukup signifikan di tahun 2022, yakni sejumlah -16%. Penurunan berikut lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Tuban (-7%), Nganjuk (-7%), serta Jombang (-10%). Angka-angka tersebut

memperlihatkan bahwasannya di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang mengalami penurunan PAD, ada kecenderungan perekonomian daerah juga terpengaruh.

Jika ditelusuri lebih lanjut, penurunan PAD di Kabupaten Bojonegoro bisa disebabkan oleh kurang optimalnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro, terutama dari dua komponen utama pajak daerah yakni PBB-P2 serta BPHTB. Di tahun 2022, dari keempat kabupaten di atas, penerimaan PBB-P2 tertinggi diraih oleh Kabupaten Nganjuk sejumlah Rp53.162.189.803, sementara penerimaan BPHTB tertinggi tercatat di Kabupaten Jombang dengan Rp46.160.870.811. Di sisi lain, penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro tercatat cukup baik dengan total Rp44.951.159.924. Namun, penerimaan BPHTB Kabupaten Bojonegoro menjadi yang terendah dibandingkan ketiga kabupaten lainnya tersebut, yakni sejumlah Rp24.143.114.660. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya penurunan PAD di Kabupaten Bojonegoro bisa diberikan pengaruh oleh kurang optimalnya penerimaan dari kedua komponen pajak daerah berikut, yakni PBB-P2 serta BPHTB.

Hubungan antara PAD serta pertumbuhan ekonomi berikut menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan daerah yang berkelanjutan, tak hanya guna menjaga stabilitas fiskal tetapi juga guna mendorong kemandirian fiskal daerah, terutama di wilayah dengan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Data memperlihatkan bahwasannya sektor pertambangan serta penggalian di Kabupaten Bojonegoro mengalami tren penurunan sejak tahun 2021 serta terus berlanjut hingga tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2024). Berlandaskan

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, penurunan *lifting* migas bisa berdampak pada kinerja penerimaan negara dari sektor migas (Kurniati, 2024). Sehingga hal berikut bisa pula mengakibatkan dana bagi hasil (DBH) yang disalurkan ke daerah menurun. Selama berikut, rerata kontribusi DBH kepada total pendapatan dareah di Kabupaten Bojonegoro meraih 48%. Di tahun 2022, penurunan produksi migas tak berdampak banyak pada penurunan DBH sebab terdapatnya *windfall profit* yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak ataupun gas dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Dari beberapa temuan di atas, bisa disimpulkan bahwasannya optimalisasi PAD sangat diperlukan tak hanya guna mendukung perekonomian daerah, tetapi juga guna mengurangi ketergantungan daerah kepada DBH. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti PBB-P2 serta BPHTB bisa menciptakan stabilitas serta kemandirian fiskal daerah.

PBB-P2 serta BPHTB ialah dua dari tiga penerimaan pajak tertinggi di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2019-2023. Berlandaskan situs web Satu Data Bojonegoro, penerimaan PBB-P2 selalu meningkat sejak tahun 2019. Penerimaan PBB-P2 terendah ialah di tahun 2019 sejumlah Rp 32.581.737.124,79. Penerimaan PBB-P2 yang paling tinggi ialah di tahun 2023 sejumlah Rp 46.806.881.524,00. Rerata pertumbuhan penerimaan PBB-P2 per tahunnya meraih 13%. Rerata pertumbuhan yang positif berikut memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 bisa berkontribusi positif kepada peningkatan PAD.

Penerimaan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro memperlihatkan tren yang fluktuatif. Penerimaan BPHTB terendah terjadi di tahun 2020 yang meraih sejumlah Rp 11.368.239.184,00. Penerimaan BPHTB tertinggi terjadi di tahun 2022 yang meraih sejumlah Rp 24.143.114.660. Rerata pertumbuhan penerimaan BPHTB per tahunnya meraih 14%. Rerata pertumbuhan yang positif berikut memperlihatkan bahwasannya BPHTB bisa berkontribusi positif kepada peningkatan PAD.

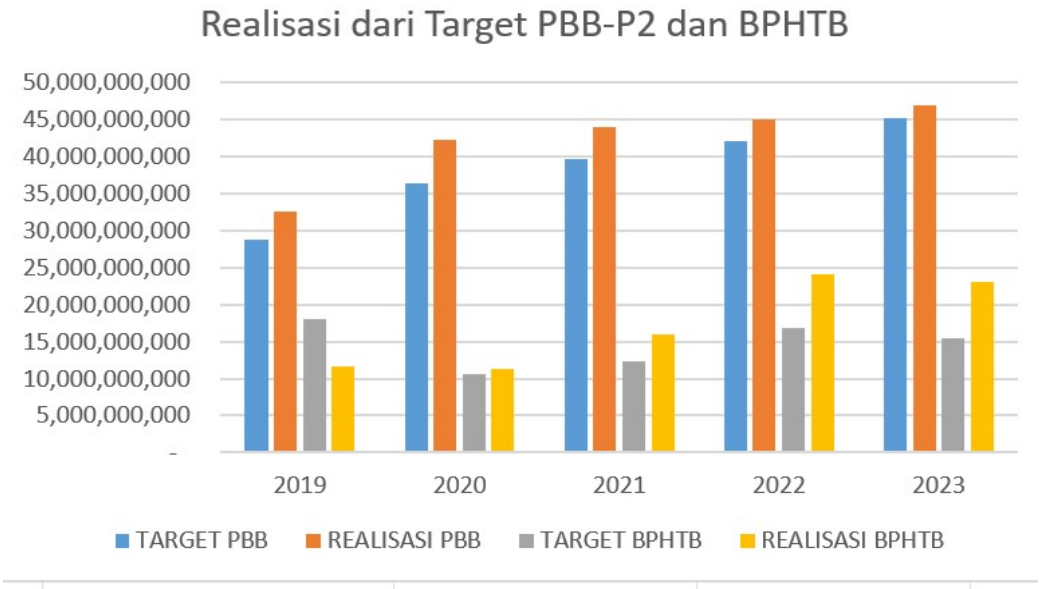

Gambar 1.2 Realisasi dari Target PBB-P2 serta BPHTB Kabupaten Bojonegoro
Sumber: diolah dari Badan Pendapatan Daerah

Beberapa penelitian terdahulu oleh Maulana & Yasin (2024), memperlihatkan PBB-P2 serta BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD di Kabupaten Sumenep. Hasil tersebut serupa dengan penelitian oleh Sugiarti (2021) yang memperlihatkan PBB-P2 serta BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD Kota Palembang. Penelitian oleh Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023) juga

memperlihatkan PBB-P2 serta BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD saat pandemi covid-19 tahun di Kota Denpasar. Penelitian oleh Rufaidah & Muharom (2022) memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 memegang pengaruh signifikan kepada PAD di Kota Bandung. Penelitian di Kota Cilegon juga memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 memegang pengaruh signifikan kepada PAD Sobri (2018). Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yanti & Suhono (2024) yang memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 memegang pengaruh negatif kepada PAD serta BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD di DKI Jakarta. Namun hasil penelitian oleh Tala, Sumual, & Rawung (2024) memperlihatkan bahwasannya meski PBB-P2 memegang pengaruh pada PAD, BPHTB tak memegang pengaruh pada PAD di Kota Tomohon. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilaksanakan di Kota Medan oleh Khalisha (2020). Selain itu, penelitian di Kabupaten Ciamis oleh Sariwulan, Usmar, & Akbar (2023) memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 tak memegang pengaruh signifikan kepada PAD.

Hasil penelitian yang bervariasi tersebut memperlihatkan bahwasannya pemungutan PBB-P2 serta BPHTB di setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Saat ini, belum ada penelitian serupa yang membahas terkait pengaruh PBB-P2 serta BPHTB kepada PAD di Kabupaten Bojonegoro. Seiring tumbuhnya sektor properti di Kabupaten Bojonegoro, PBB-P2 serta BPHTB sangat berpotensi dalam menopang kinerja PAD. Hal tersebut membuat penulis tertarik guna melaksanakan penelitian ini.

Diharapkan temuan penelitian berikut bisa menyajikan gambaran umum mengenai pengaruh PBB-P2 serta BPHTB kepada PAD serta bisa diperhitungkan dalam menentukan strategi fiskal daerah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

PBB-P2 serta BPHTB ialah pajak dengan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2023. Tingginya penerimaan kedua jenis pajak tersebut juga didorong oleh tumbuhnya sektor properti di Indonesia yang terlihat dari meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor properti. Kedua jenis pajak tersebut juga cukup resilien menghadapi gejolak perekonomian sebab pandemi covid-19. Situasi berikut memperlihatkan bahwasannya optimalisasi penerimaan PBB-P2 serta BPHTB bisa menjadi strategi efektif guna mengoptimalkan PAD serta menopang perekonomian daerah.

Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34% pada tahun 2022, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Tuban (8,88%) serta terendah di Kabupaten Bojonegoro (-6,16%). Pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut disinyalir akibat penurunan realisasi PAD di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2022 sejumlah -16%. Hal berikut bisa disebabkan oleh kurang optimalnya penerimaan pajak daerah. PBB-P2 serta BPHTB ialah dua dari tiga penerimaan pajak tertinggi di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2019-2023 namun penerimaan BPHTB Kabupaten Bojonegoro termasuk yang terendah dibandingkan dengan kabupaten di

sekitarnya, sementara penerimaan PBB-P2 masih relatif baik meskipun tak meraih angka tertinggi. Selain itu, penurunan produksi migas juga bisa berdampak pada perekonomian Bojonegoro, mengingat Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas menyumbang rerata 48% dari total pendapatan daerah.

Data historis memperlihatkan bahwasannya penerimaan PBB-P2 di Bojonegoro mengalami tren peningkatan yang stabil dengan rerata pertumbuhan 13% per tahun selama 2019-2023. Sebaliknya, penerimaan BPHTB memperlihatkan fluktuasi dengan rerata pertumbuhan 14% per tahun. Pertumbuhan positif kedua jenis pajak berikut bisa mendukung optimalisasi PAD sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada DBH serta mengoptimalkan kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro. Penelitian berikut akan menguji apakah PBB-P2 serta BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD di Kabupaten Bojonegoro.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan maka bisa dirumuskan pernyataan penelitian berikut :

1. Apakah PBB-P2 memegang pengaruh positif pada penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah BPHTB memegang pengaruh positif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berikut ialah guna menganalisis serta menguji dengan cara empiris pengaruh kedua jenis pajak properti, yakni PBB-P2 serta BPHTB, terhadap PAD di Kabupaten Bojonegoro.

1. Guna menganalisis pengaruh PBB-P2 pada penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro;
2. Guna menganalisis pengaruh BPHTB terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian berikut bisa menyajikan manfaat seperti dibawah ini :

a. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian berikut akan menambah pemahaman ilmiah terkait pajak properti. Temuan penelitian berikut bisa menjadi panduan bagi penulis selanjutnya yang melaksanakan penelitian terkait.

b. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil penelitian berikut bisa menyajikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, terkhususnya Kabupaten Bojonegoro terkait pengaruh PBB-P2 serta BPHTB kepada PAD pada rangka mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta kemandirian fiskal.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Berlandaskan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi di Indonesia ialah, dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melimpahkan kewenangan kepada daerah otonom guna mengatur serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Dengan menyajikan luasnya kewenangan kepada pemerintah daerah guna mengatur serta mengawasi sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pemungutan pajak daerah, Indonesia sudah memberlakukan otonomi daerah sejak tahun 2004. Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, serta keistimewaan daerah pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan berikut berupaya guna mempercepat tercapainya kesejahteraan umum lewat peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peran serta aktif masyarakat serta daya saing daerah. Desentralisasi fiskal sangat penting guna mendukung strategi desentralisasi di berbagai negara sebab komponen keuangan pada pelaksanaan otonomi berikut ialah komponen penting bagi pemerintah daerah guna melaksanakan pembangunan.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal setidaknya mempunyai tiga tujuan utama, yakni mengurangi kesenjangan fiskal antar wilayah, mengoptimalkan efisiensi pada penyediaan layanan publik, serta mempererat relasi antara pemerintah serta masyarakat (Zakaria & Hasna, 2014). Desentralisasi fiskal diharapkan mampu memperbaiki efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah (Moisiu, 2013). Selain itu, berlandaskan Oates (1993), desentralisasi fiskal juga bisa mendorong peningkatan efisiensi ekonomi sebab pemerintah daerah yang sehari-hari lebih berjarak dekat dengan masyarakat setempat memegang kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan serta preferensi warga dengan cara tepat serta responsif. Pemerintah daerah juga mempunyai pemahaman yang lebih mendalam terkait preferensi masyarakat serta kapasitas pembiayaan di wilayahnya. Kondisi berikut memungkinkan peningkatan efisiensi yang pada gilirannya mendorong penduduk untuk tinggal di wilayah yang mampu memenuhi preferensi mereka. Dengan desentralisasi, kesejahteraan kolektif yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemerintahan sentralistik. Namun, tingkat efisiensi yang tercapai cenderung bervariasi di setiap daerah, diberikan pengaruh oleh perbedaan preferensi serta kapasitas pembiayaan masing-masing wilayah.

Christia (2019) mengungkapkan bahwasannya desentralisasi fiskal di tahun 2018 sudah menyajikan kontribusi positif kepada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang tercermin dari ekonomi yang mulai tumbuh di berbagai wilayah.

Peningkatan berikut tak hanya terlihat pada aspek makroekonomi, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah guna mengelola keuangan serta sumber daya lokal dengan lebih efektif. Teori desentralisasi fiskal menjadi pijakan penting guna memahami bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan fiskalnya guna mengoptimalkan PAD. Dengan keleluasaan yang disajikan, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi lokal serta mengelola sumber daya dengan cara lebih mandiri, sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat basis pendapatan mereka.PBB-P2 serta BPHTB selaku sumber pajak daerah mencerminkan implementasi kebijakan fiskal yang terdesentralisasi. Pemerintah daerah memegang kewenangan guna menetapkan, mengelola, serta mengoptimalkan pendapatan dari kedua jenis pajak tersebut. Desentralisasi fiskal diharapkan bisa mendukung efisiensi pengelolaan pajak daerah, sehingga mengoptimalkan kontribusi PBB-P2 serta BPHTB kepada PAD. Pengelolaan yang efektif serta responsif kepada kebutuhan lokal bisa menyajikan dampak positif kepada pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak serta retribusi daerah, alokasi serta pengelolaan kekayaan daerah, serta keuangan sah lainnya yang menjadi milik daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah beberapa komponen yang membentuk PAD. PAD yang tinggi memperlihatkan bahwasannya sebuah daerah tak lagi menggantungkan pada

pendanaan dari pemerintah pusat serta sudah meraih kemandirian serta swasembada ekonomi.

2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 ialah pajak yang tergantung pada apakah seseorang ataupun sebuah badan usaha memiliki, mengendalikan, ataupun memakai tanah ataupun bangunan. Pajak berikut mencakup permukaan tanah, termasuk hasil reklamasi. Namun, pajak berikut tak mencakup tanah yang dipakai untuk pertambangan, kehutanan, ataupun perkebunan.

Berlandaskan UU HKPD, orang ataupun badan yang mempunyai hak ataupun kelebihan atas tanah ataupun bangunan ialah subjek PBB-P2. lewat prosedur penilaian yang unik, pemerintah daerah menetapkan nilai tanah ataupun bangunan berlandaskan Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP). Sebagai bentuk meringankan beban pajak, pemerintah daerah juga menetapkan NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang mempunyai ambang batas minimum Rp10.000.000 per wajib pajak. NJOPTKP hanya bisa dihitung untuk satu objek kena pajak setiap tahun jika wajib pajak mempunyai beberapa objek kena pajak di sebuah daerah.

Pemerintah daerah bisa menetapkan NJOP menjadi dasar menghitung PBB-P2 sebanyak paling sedikit 20% (dua puluh persen) serta paling banyak 100% (seratus persen) dari NJOP tersebut setelah dikurangi NJOPTKP. Penetapan NJOP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setiap tiga tahun, namun pemerintah daerah

memegang kebebasan guna meninjau NJOP setiap tahun. Kepala daerah bertanggung jawab menetapkan besaran NJOP, sementara tarif pajaknya maksimal 0,5%, dengan tarif lebih rendah untuk lahan pertanian serta peternakan. PBB-P2 dihitung berlandaskan kondisi objek pada 1 Januari setiap tahun, serta pembayarannya dilaksanakan di wilayah tempat objek berada.

2.2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Saat mendapatkan hak atas tanah ataupun bangunan, pajak yang dikenal selaku BPHTB dipungut. Transaksi jual beli, warisan, hadiah, tukar-menukar, serta jenis pelestarian hak lainnya termasuk di antaranya. BPHTB berlaku untuk jenis pembelian hak atas tanah ataupun bangunan berikut:

a. pemindahan hak sebab:
    1. transaksi jual beli;
    2. pertukaran;
    3. pemberian hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. penyertaan modal ke perseroan/badan hukum;
    7. pemisahan hak yang memicu peralihan kepemilikan;
    8. penetapan pembeli dalam lelang resmi;
    9. eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

10. konsolidasi usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. perolehan melalui hadiah; dan

b. pemberian hak baru sebab:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

Perolehan Hak atas Tanah ataupun Bangunan tersebut meliputi:

a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

Setiap orang ataupun badan yang mendapatkan hak milik atas Tanah dan Bangunan disebut selaku Subjek dan Wajib Pajak BPHTB. BPHTB dikenakan berlandaskan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Berikut berikut ialah dasar penentuan NPOP pada BPHTB :

a. harga transaksi ditetapkan selaku nilai perolehan yang akan dikenakan pajak ketika proses penjualan tanah ataupun bangunan terjadi;

b. nilai pasar dimanfaatkan pada rangka pertukaran, pemberian hibah, hibah wasiat, waris, penyertaan modal ke perseroan/badan hukum, pemisahan hak yang memicu peralihan kepemilikan, eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, konsolidasi usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, perolehan melalui hadiah atau pemberian hak baru sebab kelanjutan pelepasan hak; dan
c. harga yang ditetapkan pada risalah lelang ketika seseorang ditetapkan selaku pembeli dalam sebuah lelang properti.

Apabila pada sebuah peristiwa diketahui bahwasannya NPOP tak bisa diketahui ataupun ternyata lebih rendah dibandingkan NJOP yang tercantum pada ketetapan PBB-P2, maka yang ditetapkan selaku dasar perhitungan BPHTB ialah NJOP di tahun berlangsungnya peralihan hak tersebut.

Dalam proses penetapan jumlah BPHTB yang wajib dibayarkan, Pemerintah Daerah juga menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) perlindungan bagi wajib pajak yang melaksanakan peralihan hak dengan nilai rendah, seperti rumah sederhana ataupun lahan pertanian kecil. Komponen berikut ialah pengurang pada perhitungan BPHTB. Besaran NPOPTKP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) khusus untuk pertama kali ketika wajib pajak mendapatkan hak atas properti pada wilayah daerah tersebut.

Apabila orang yang masih mempunyai relasi darah dengan pemberi hibah, misalnya suami ataupun istri, menerima hak berlandaskan wasiat ataupun warisan, nilai

dibebaskan dari pengenaan pajak paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

NPOP dipotong dari NPOPTKP serta dikalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, maksimal 5%, guna menentukan besarnya pokok BPHTB yang wajib dibayarkan. Setiap pemerintah kabupaten ataupun kota menetapkan peraturan daerah yang lebih rinci yang mengatur tarif pajak untuk pembelian hak milik serta hak konstruksi.”

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

. Penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah berikut berfungsi selaku referensi dalam penyusunan hipotesis untuk penelitian ini:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
1	Maulana & Yasin (2024)	**Variabel Dependen** Pendapatan Asli Daerah **Variabel Independen** Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Sumenep **Sampel** Penerimaan PBB-P2, BPHTB, PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022 **Teknik Analisis** Analisis Regresi Linear Berganda	PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap PAD

2	Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023)	**Variabel Dependen** Pendapatan Asli Daerah **Variabel Independen** Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Kota Denpasar **Sampel** Penerimaan PBB-P2, BPHTB, PAD Kota Denpasar 2019-2021 **Teknik Analisis** Analisis Regresi Linear Berganda	BPHTB dan PBB-P2 masing-masing berpengaruh positif terhadap PAD Kota Denpasar selama pandemi COVID-19 tahun 2019–2020. Secara simultan, kedua pajak ini juga memberikan pengaruh positif terhadap PAD.
3	Utari (2023)	**Variabel Dependen** Pendapatan Asli Daerah **Variabel Independen** Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Plaju Kota Palembang **Sampel** Penerimaan PBB-P2 dan PAD Kecamatan Plaju Kota PalembangTahun 2018-2022 **Teknik Analisis** Analisis Regresi Linear Sederhana	PBB-P2 berpengaruh terhadap PAD
4	Rufaidah dan Muharom (2022)	**Variabel Dependen** Pendapatan Asli Daerah **Variabel Independen** Penerimaan PBB-P2 Kota Bandung **Sampel** Penerimaan PBB-P2 dan PAD Kota Bandung Tahun 2013-2018 **Teknik Analisis** Analisis Regresi Linear Sederhana	PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD

5	Sugiarti (2021)	**Variabel Dependen** Pendapatan Asli Daerah **Variabel Independen** Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Kota Palembang **Sampel** Penerimaan PBB-P2, BPHTB, Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2005-2019 **Teknik Analisis** Analisis Regresi Linear Berganda	PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PAD.
6	Sobri (2018)	**Variabel Dependen** Pendapatan Asli Daerah **Variabel Independen** Penerimaan PBB-P2 Kota Cilegon **Sampel** Penerimaan PBB-P2 Kota Cilegon **Teknik Analisis** Analisis Regresi Linear Berganda	PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hipotesis yang bisa diambil pada studi berikut berlandaskan masalah yang dirumuskan serta dihubungkan dengan teori-teori yang ada ialah seperti dibawah ini:

2.4.1 Pengaruh PBB-P2 terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro

Berlandaskan teori desentralisasi fiskal, pendelegasian wewenang yang disajikan kepada pemerintah daerah guna mengelola sumber daya lokal, termasuk perpajakan, memungkinkan peningkatan efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah

(Oates, 1993). PBB-P2 ialah satu diantara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ialah hasil dari kebijakan desentralisasi fiskal.

Penelitian terdahulu mendukung terdapatnya relasi positif antara PBB-P2 serta PAD. Penelitian oleh Maulana & Yasin (2024) serta Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023) memperlihatkan bahwasannya peningkatan PBB-P2 berkontribusi signifikan kepada PAD. pada penelitian berikut, penulis mengembangkan hipotesis bahwasannya pertumbuhan PBB-P2 di Kabupaten Bojonegoro akan memegang pengaruh positif kepada penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro. Berlandaskan literatur di atas, maka hipotesis yang dirumuskan ialah

H1: PBB-P2 memegang pengaruh positif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro.

2.4.2 Pengaruh BPHTB terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro

Berlandaskan teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memegang kewenangan penuh dalam mengelola BPHTB, yang ialah satu diantara pajak daerah potensial. Kewenangan berikut memungkinkan daerah guna menyesuaikan kebijakan fiskalnya selaras dengan karakteristik lokal, menciptakan efisiensi pada pengelolaan pajak, serta mengoptimalkan penerimaan PAD.

Penelitian sebelumnya mendukung pandangan berikut ialah penelitian oleh Maulana & Yasin (2024) serta Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023) yang menemukan bahwasannya BPHTB mempunyai relasi positif yang signifikan kepada PAD. Peneliti akan menganalisis pengaruh BPHTB kepada penerimaan PAD yang

terjadi di Kabupaten Bojonegoro. pada penelitian berikut, penulis mengembangakan hipotesis bahwasannya BPHTB memegang pengaruh positif kepada penerimaan PAD. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan ialah seperti dibawah ini:

H2: BPHTB memegang pengaruh positif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro

2.5 KERANGKA PENELITIAN Bojonegoro Regency

Model kerangka penelitian berikut menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro selaku variabel dependen serta PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro serta BPHTB Kabupaten Bojonegoro selaku variabel independen yang memberikan pengaruh variabel dependen. Adapun kerangka penelitian pada penelitian berikut bisa dilihat pada Gambar 2.1.

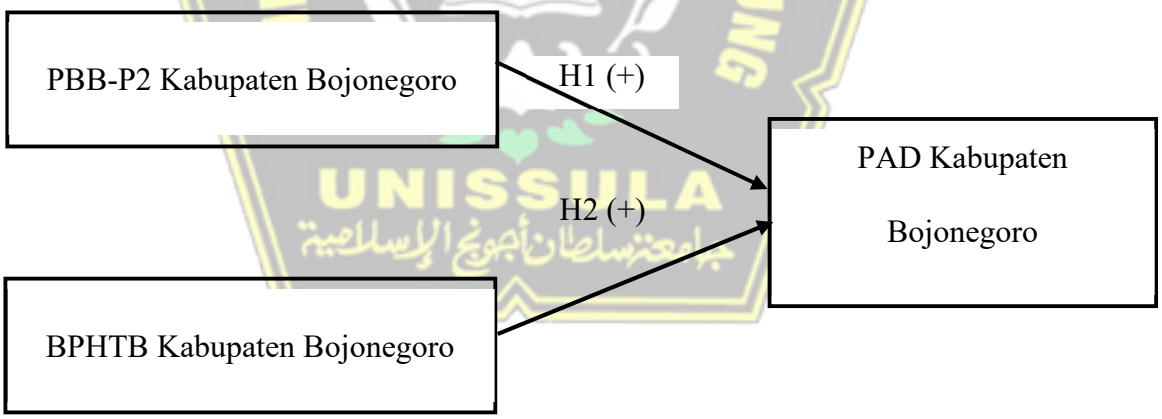

Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian eksplanatori ialah metodologi yang dipakai. Penelitian eksplanatori ialah sebuah penelitian yang menggambarkan relasi variabel X dengan variabel Y. Penelitian berikut juga termasuk pada jenis penelitian kuantitatif, dimana basis yang dipakai ialah filsafat positivisme. Filsafat positivisme melihat fenomena dengan cara konkrit, terukur serta menilai relasi dengan sebab-akibat (Sugiyono, 2019).

Guna metode yang dipakai untuk mengolah serta menganalisa data pada penelitian berikut ialah metode kuantitatif. Berlandaskan Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris (2022) metode berikut dipakai guna mengetahui pengaruh yang diberi perlakuan (variabel independen) kepada hasil yang didapat (variabel dependen). Metode berikut juga bertujuan guna membuktikan hipotesis pada kondisi yang dikendalikan ataupun mencari pengaruh. Penelitian berikut akan menganalisis pengaruh PBB-P2 serta BPHTB kepada penerimaan PAD di Kabupaten Bojonegoro.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yakni seluruh objek ataupun subjek penelitian yang akan dijadikan sumber guna mendapatkan data ataupun informasi (Anasti, Anasta, Harnovinsah, &

Oktris, 2022). Populasi pada penelitian berikut ialah data realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB, serta PAD Kabupaten Bojonegoro per bulan pada rentang tahun 2019-2023 sehingga total data yang menjadi populasi ialah 60 data.

Pemilihan rentang waktu 2019-2023 didasarkan pada alasan bahwasannya sejak tahun 2019, ada peningkatan kualitas manajemen PBB-P2 serta BPHTB di Kabupaten Bojonegoro lewat digitalisasi sistem. Pemilihan rentang tahun berikut diharapkan bisa lebih representatif serta relevan dalam menggambarkan relasi antara PBB-P2, BPHTB, serta PAD di Kabupaten Bojonegoro.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sebagian dari objek ataupun subjek yang ada pada populasi dinyatakan dengan istilah sampel (Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris, 2022). Jika populasi berjumlah besar sehingga peneliti tak mempunyai cukup sumber daya untuk seluruh anggota populasi, maka peneliti bisa mengambil sebagian objek atau subjek sebagai contoh yang berasal dari populasi itu. Pengambilan sampel jenuh ialah istilah yang dipakai pada beberapa situasi, ketika peneliti memilih guna memasukkan setiap anggota populasi ke pada sampel. Pengambilan sampel jenuh, berlandaskan Sugiyono (2019), ialah metode pemilihan sampel yang melibatkan pengambilan sampel setiap anggota komunitas. Biasanya dipakai ketika populasinya kecil ataupun ketika cakupan data yang menyeluruh diperlukan untuk penelitian.

Sebab semua data yang menjadi populasi penelitian akan dijadikan sampel, maka pada penelitian berikut peneliti memakai sampel jenuh. Dengan demikian, data

realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB, serta PAD per bulan Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2023 yang berjumlah 60 data, dijadikan selaku sampel penelitian. Agar hasil penelitian bisa menyajikan gambaran yang lebih mendalam serta akurat terkait hubungan antara PBB-P2, BPHTB, serta PAD di Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2023, maka teknik berikut dipakai agar semua unsur pada populasi bisa dianalisis tanpa ada yang tereliminasi.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Sumber informasi utama pada penelitian berikut ialah data sekunder. Sugiyono (2019) mendefinisikan data sekunder selaku informasi yang diperoleh peneliti dengan cara tak langsung, baik dari sumber lain maupun dari jenis bahan tertulis lainnya. Data sekunder pada penelitian berikut bersumber dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019–2023.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini menerapkan teknik dokumentasi. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2019), Pengumpulan data tertulis berupa laporan resmi, dokumen statistik, catatan arsip, serta sumber pendukung terkait lainnya ialah satu diantara pendekatan dokumentasi. Data untuk penelitian berikut dikumpulkan serta diolah dari dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mencakup tahun 2019–2023.

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Independen

"Variabel independen ataupun variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya," ungkap Irwansyah, Azis, dan Hidayat (2024). Variabel independen pada penelitian berikut meliputi BPHTB Kabupaten Bojonegoro serta PBB-P2.

3.5.2 Variabel Dependen

Pernyataan variabel dependen ataupun variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dikemukakan oleh Irwansyah, Azis, dan Hidayat (2024). Variabel dependen pada penelitian berikut ialah PAD Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 3.1 : Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel Dependen			
1.	PAD Kabupaten Bojonegoro (Y)	Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)	Penerimaan PAD Kabupaten Bojonegoro Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2019-2023
Variabel Independen			

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro (X1)	PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)	Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2019-2023
2.	BPHTB Kabupaten Bojonegoro (X2)	BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)	Penerimaan BPHTB Kabupaten Bojonegoro Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
			Kabupaten Bojonegoro 2019-2023

Sumber : Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023)

3.6 METODE ANALISIS DATA

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif, merujuk pada Sugiyono (2019), ialah statistika yang dipakai guna mengkaji data dengan cara mengkarakterisasi ataupun mengilustrasikan data yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bertujuan guna menarik generalisasi ataupun simpulan yang berlaku bagi masyarakat luas. pada penelitian berikut, data dirangkum ataupun ditampilkan dengan memakai indikator-indikator seperti rerata (mean), median, nilai maksimum, serta simpangan baku. Ujian berikut bertujuan guna menyederhanakan pemahaman faktor-faktor penelitian. Perangkat lunak yang disebut SPSS dipakai guna membantu operasi pengolahan data.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menjalankan analisis regresi linear, Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris (2022) menyatakan bahwasannya uji asumsi tradisional perlu diterapkan.

Tujuan pengujian berikut ialah guna menentukan apakah model yang dipakai pada penelitian berikut bisa memperlihatkan relasi yang bermakna. Oleh sebab itu, model wajib lulus uji asumsi regresi. Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi termasuk di antara uji asumsi tradisional yang dipakai pada penelitian berikut.

1. **Uji Normalitas**

   Berlandaskan Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris (2022),), bahwa sebelum beralih ke uji hipotesis, uji kenormalan wajib diselesaikan. Sasaran uji berikut ialah guna menentukan apakah data yang diteliti terdistribusi dengan cara teratur ataupun tidak. Uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov bisa dipakai guna melaksanakan uji kenormalan. Nilai p sejumlah 0,05 memperlihatkan bahwasannya data terdistribusi dengan cara teratur.

2. **Uji Autokorelasi**

   Berlandaskan Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris (2022), uji autokorelasi dipakai utnuk menguji data yang diperoleh pada kurun waktu tertentu. Uji autokorelasi bisa dilaksanakan dengan uji Durbin Watson pada program SPSS. Pengujian autokorelasi memakai uji Durbin Watson memakai kriteria berikut :

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0<d<dL$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dL\leq d\leq dU$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4-dL<d<4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4-dU\leq d\leq 4-dL$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$dU<d<4-dU$

Sumber: Ghozali (2018)

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

3. Uji Multikolinearitas

Berlandaskan Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris (2022), menjelaskan bahwasannya uji multikolinearitas dilaksanakan guna mengetahui apabila antarvariabel bebas ataupun independen terjadi korelasi ataupun relasi yang kuat, dengan demikian model regresi tersebut tak baik. Guna mengetahui gejala multikolinearitas tersebut bisa dilaksanakan dengan berlandaskan nilai *tolerance* serta VIF. Jika nilai *tolerance* untuk variabel independen lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10,00 maka tak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi

4. Uji Heteroskedastisitas

Berlandaskan penjelasan Anasti, Anasta, Harnovinsah, & Oktris (2022), uji heteroskedastisitas dipakai guna menguji apakah nilai variasi pengamatan dari nilai residual satu dengan lainnya berbeda, tetapi jika nilai variansinya sama ataupun tetap tak berbeda, maka dinamakan homoskedastisitas. Guna menguji heteroskedastisitas, metode Glejser dipilih selaku instrumen verifikasi mengingat kapasitasnya dalam menyajikan hasil pengujian yang lebih objektif dibandingkan pendekatan visual lewat *scatter plot* yang rentan kepada interpretasi subjektif peneliti (Kuara & Nasution, 2020). Dengan pengukuran seperti dibawah ini :

a. Jikai nilai sig > 0,05, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.
b. Jika nilai sig < 0,05, maka heteroskedastisitas terjadi.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari metode analisis berikut ialah guna menguji teori serta menemukan solusi atas permasalahan. Analisis regresi dengan banyak variabel independen dikenal selaku regresi linier berganda (Ghozali, 2018). Dampak BPHTB serta PBB-P2 kepada pendapatan PAD diketahui lewat pemakaian analisis regresi linier berganda. Berikut berikut ialah persamaan regresinya:

$$Y = \alpha 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PAD

α0 = Konstanta

β1X1 = Koefisien Regresi Variabel PBB-P2

β2X2 = Koefisien Regresi Variabel BPHTB

e = Error

3.6.4 Uji Kelayakan Model

3.6.4.1 Uji F

Sebagai prosedur statistik dasar, uji kelayakan model (uji F) dipakai guna menguji validitas keseluruhan spesifikasi model regresi dalam merepresentasikan pengaruh kumulatif semua variabel independen kepada variabel dependen," berlandaskan Ghozali (2018). Penelitian berikut mengkaji signifikansi statistik kombinasi linier variabel independen model dalam meramalkan perubahan variabel dependen. Distribusi F dipakai untuk pengujian hipotesis pada ambang signifikansi α = 5% (0,05). Berikut berikut ialah persyaratan untuk uji kelayakan model (uji F) :

1) Apabila nilai signifikansi < 0,05, berarti PBB-P2 serta BPHTB memegang pengaruh signifikan simultan kepada penerimaan PAD;
2) Apabila nilai signifikansi > 0,05, berarti PBB-P2 serta BPHTB tak memegang pengaruh signifikan simultan kepada penerimaan PAD.

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Berlandaskan Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) ialah sebuah uji yang dipakai guna mengukur sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Angka antara nol serta satu memperlihatkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang rendah memperlihatkan bahwasannya variabel independen hanya bisa menyajikan penjelasan terbatas untuk variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang cenderung bernilai ss1 memperlihatkan bahwasannya variabel independen bisa memprediksi variabel komitmen dengan tepat.

3.6.5 Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji-T ialah guna memastikan sebagian bagaimana faktor-faktor independen memberikan pengaruh variabel dependen. Perangkat lunak SPSS akan dipakai oleh para peneliti guna melaksanakan pengujian berikut. Berikut berikut ialah persyaratan untuk pengujian hipotesis:

a) Apabila nilai signifikansi t < 0,05 berarti PBB-P2 ataupun BPHTB memegang pengaruh dengan cara parsial kepada penerimaan PAD;
b) Jika nilai signifikansi t > 0,05 berarti PBB-P2 ataupun BPHTB tak memegang pengaruh dengan cara parsial kepada penerimaan PAD.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bojonegoro ialah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur dengan wilayah seluas 230.706 Ha ataupun 2.307,06 km2. Kabupaten berikut terletak pada posisi 6 derajat 59’ sampai 7 derajat 37’ Lintang Selatan serta 112 derajat 25’ sampai 112 derajat 09’ Bujur Timur. Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, dengan rincian 419 desa serta 11 kelurahan.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Bojonegoro diberi kewenangan guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Pajak daerah ialah satu diantara sumber pendapatan yang dipakai Kabupaten Bojonegoro guna melaksanakan kewajiban tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ialah satuan kerja perangkat daerah tipe A yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan dukungan keuangan selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati

lewat Sekretaris Daerah. Bapenda Kabupaten Bojonegoro melaksanakan tugas-tugas berikut selaku bagian dari tugas pokoknya:

a. penyusunan kebijakan fiskal daerah;
b. pelaksanaan tugas pembantuan teknis daerah di bidang pendapatan;
c. pemantauan, penilaian, serta pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan teknis daerah di bidang pendapatan;
d. pemberian bantuan teknis pada rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pendapatan daerah pada urusan pemerintahan daerah; serta
e. pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan Bupati selaras dengan kewenangannya.

4.1 Struktur Organisasi Bapenda

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 terkait Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Bapenda Kabupaten Bojonegoro membentuk struktur organisasi sesuai aturan tersebut. Gambar 4.1 memperlihatkan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

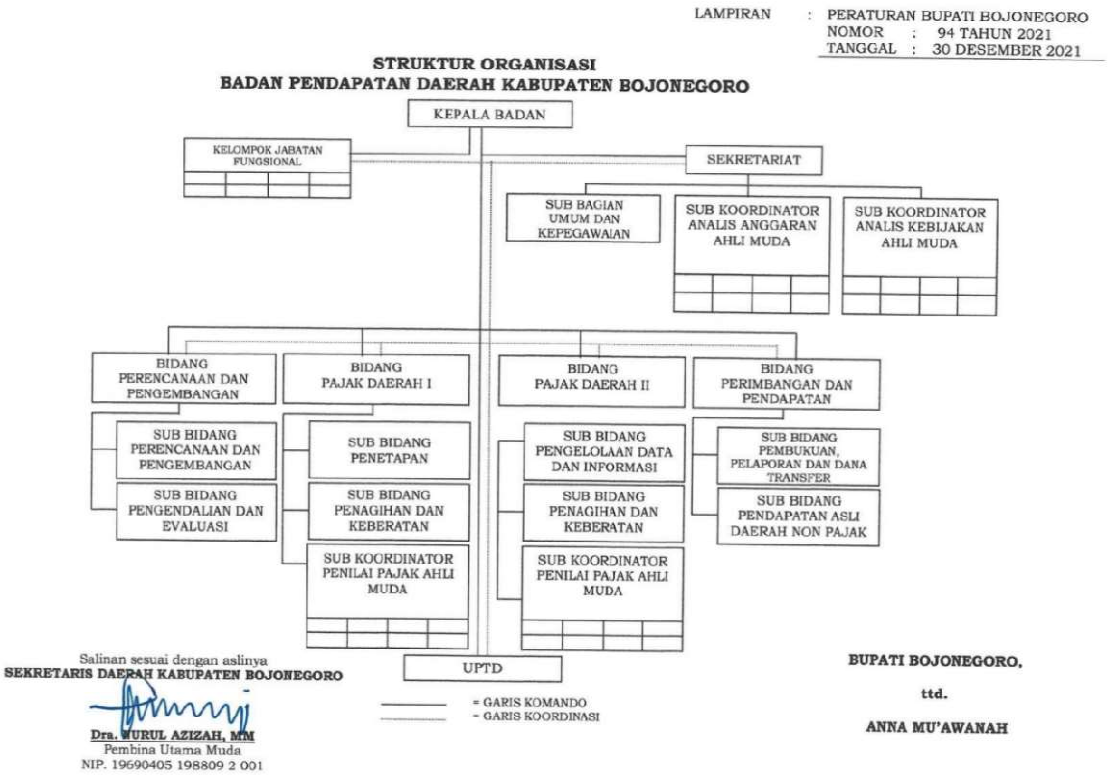

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

	PBB-P2	BPHTB	PAD
N	60	60	60
Minimum	106.419.440,00	513.680.647,00	25.204.250.086,20
Maximum	46.806.881.524,00	24.143.114.660,00	955.627.986.619,39
Mean	20.973.900.191,35	8.124.618.084,87	414.939.311.812,99
Median	18.426.395.565,50	6.249.290.432,50	387.629.942.292,73
Std. Deviation	16.283.778.722,91	6.284.039.754,64	270.218.796.105,99

Berlandaskan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1 bisa dijelaskan seperti dibawah ini :

1. PBB-P2 (X1)

   Hasil analisis deskriptif pada variabel PBB-P2 memperlihatkan bahwasannya diperoleh jumlah data sebanyak 60 bulan. Hal tersebut memperlihatkan nilai minimum sejumlah 106.419.440,00 yang diraih pada bulan Januari 2022. Sedangkan nilai maksimum sejumlah 46.806.881.524,00 diraih pada bulan Desember 2023. Nilai rerata sejumlah 20.973.900.191,35 dengan standar deviasi sebesar. 16.283.778.722,91 yang menunjukkan standar deviasi lebih rendah dari rerata maka bisa diindikasikan bahwasannya data yang dimiliki

oleh masing-masing bulan tak jauh berbeda. Nilai median sejumlah 18.426.395.565,50 yang berarti lebih kecil dari mean bisa mengindikasikan data cenderung miring ke kanan.

2. BPHTB (X2)

   Hasil analisis deskriptif pada variabel BPHTB memperlihatkan bahwasannya diperoleh jumlah data sebanyak 60 bulan. Hal tersebut memperlihatkan nilai minimum sejumlah 513.680.647,00 yang diraih pada bulan Januari 2020. Sedangkan nilai maksimum sejumlah 24.143.114.660,00 diraih pada bulan Desember 2022. Nilai rerata sejumlah 8.124.618.084,87 dengan standar deviasi sebesar. 6.284.039.754,64 yang menunjukkan standar deviasi lebih rendah dari rerata maka bisa diindikasikan bahwasannya data yang dimiliki oleh masing-masing bulan tak jauh berbeda. Nilai median sejumlah 6.249.290.432,50 yang berarti lebih kecil dari mean bisa mengindikasikan data cenderung miring ke kanan.

3. PAD (Y)

   Hasil analisis deskriptif pada variabel PAD memperlihatkan bahwasannya diperoleh jumlah data sebanyak 60 bulan. Hal tersebut memperlihatkan nilai minimum sejumlah 25.204.250.086,20 yang diraih pada bulan Januari 2021. Sedangkan nilai maksimum sejumlah 955.627.986.619,39 diraih pada bulan Desember 2021. Nilai rerata sejumlah 414.939.311.812,99 dengan standar deviasi sejumlah 270.218.796.105,99 yang menunjukkan standar deviasi lebih

rendah dari rerata maka bisa diindikasikan bahwasannya data yang dimiliki oleh masing-masing bulan tak jauh berbeda. Nilai median sejumlah 387.629.942.292,73 yang berarti lebih kecil dari mean bisa mengindikasikan data cenderung miring ke kanan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Setiap variabel memperlihatkan kecenderungan condong ke kanan, berlandaskan temuan analisis statistik deskriptif. Oleh sebab itu, pengujian normalitas lebih lanjut, terkhususnya pengujian Kolmogorov-Smirnov, diperlukan guna menentukan apakah data memang terdistribusi normal ataupun tidak. Sebelum melaksanakan pengujian regresi, pengujian berikut juga ialah satu diantara persyaratan untuk pengujian asumsi tradisional. Data dianggap terdistribusi normal jika temuan pengujian memperlihatkan nilai Sig. (nilai-p) lebih tinggi dari 0,05. Tabel di bawah berikut menampilkan temuan hasil pengujian normalitas:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

		Unstardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0001312
	Std. Deviation	1.008995E+11
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.097
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		.008
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.	.009

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Jelas dari tabel 4.2 bahwasannya uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan angka signifikansi 0,008. Sebab tingkat signifikansi di bawah 0,05, temuan berikut memperlihatkan bahwasannya data pada penelitian berikut tak terdistribusi dengan cara teratur. Sebab nilai rerata untuk setiap variabel lebih tinggi daridalam median, hal berikut mendukung temuan analisis statistik deskriptif yang dilaksanakan sebelumnya, yang memperlihatkan bahwasannya data memang cenderung condong ke kanan (kemiringan positif). Agar data terdistribusi dengan baik, transformasi data diperlukan. Sebab transformasi logaritmik dengan cara efektif mengurangi kemiringan positif,

maka transformasi data inilah yang akan dipakai pada penelitian berikut (Huang et al, 2023).

Setelah transformasi data ke pada bentuk logaritma dilaksanakan, uji normalitas dilaksanakan kembali dengan hasil berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kedua

		Unstardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	0.10288372
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.059
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		.098
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.	.009

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Dari tabel 4.2 bisa diketahui bahwasannya nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov setelah transformasi data dilaksanakan ialah sejumlah 0,98 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya data sudah berdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi akan dilaksanakan setelah selesainya uji kenormalan. Uji Durbin-Watson dipakai guna melaksanakan uji autokorelasi pada penelitian berikut. Tabel di bawah berikut menampilkan temuan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

No	Durbin-Watson	Keterangan
1	0.501	Terjadi Autokorelasi

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Berlandaskan tabel 4.2 bisa diketahui bahwasannya hasil uji autokorelasi memperlihatkan angka Durbin-Watson sejumlah 0,501. Angka tersebut berada di bawah nilai dU = 1.6518. Sehingga bisa dinyatakan bahwasannya data ada gejala autokorelasi. Guna mengatasi masalah tersebut, penelitian berikut akan memakai metode *cochrane orcutt* guna mengatasi gejala autokorelasi pada data.

Berikut ialah hasil uji autokorelasi setelah memakai metode *cochrane orcutt* :

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Kedua

No	Durbin-Watson	Keterangan
1	1.849	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Hasil tersebut memperlihatkan angka Durbin Watson sejumlah 1,849. Sehingga hasil tersebut bisa dirumuskan seperti dibawah ini:

= dU < dw < 4 – dU

= 1.6518 < 1,849 <2,3482

Nilai Durbin Watson, yang lebih besar dari nilai dU serta kurang dari 4-dU, selaras dengan aturan, berlandaskan temuan perhitungan di atas. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan dari hasil pengujian bahwasannya data tak memperlihatkan autokorelasi.

4.3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ialah uji asumsi tradisional berikutnya. Uji berikut diperlukan guna mengidentifikasi gejala multikolinearitas berlandaskan skor toleransi serta VIF. Gejala multikolinearitas tak ada pada model regresi jika nilai toleransi variabel independen lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10,00. Tabel di bawah berikut menampilkan temuan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PBB-P2	0.197	5.083	Tidak terjadi multikolinearitas
BPHTB	0.197	5.083	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Berlandaskan tabel 4.6 bisa diketahui bahwasannya hasil uji multikolinearitas memperlihatkan angka *tolerance* sejumlah 0,197 sehingga angka tersebut sudah lebih dari 0,10. Sedangkan angka VIF memperlihatkan hasil sejumlah 5,083 sehingga angka tersebut kurang dari VIF. Atas hasil pengujian tersebut bisa disimpulkan bahwasannya tak terjadi multikolinearitas pada data.

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastitsitas

Uji Glejser dipakai pada penelitian berikut guna menguji heteroskedastisitas sebab bisa memastikan kebenaran data, tak seperti uji grafik plot yang bisa menimbulkan bias (Kuara & Nasution, 2020). Tabel di bawah berikut menampilkan temuan uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1	PBB-P2	0.473	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	BPHTB	0.643	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan angka signifikansi sejumlah 0,473 pada variabel PBB-P2 serta 0,643 pada variabel BPHTB sehingga sudah lebih dari angka signifikansi 0,05. Berlandaskan hasil pengujian tersebut bisa disimpulkan bahwasannya tak terjadi heteroskedastisitas pada data.

4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah guna menguji teori serta menemukan solusi atas permasalahan. Tabel di bawah berikut menampilkan temuan analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

No	Variabel	*Unstandardized Coefficients*		Signifikansi
		B	***Std. Error***	
1	*(Constant)*	1.387	0.226	0.000
2	PBB-P2	0.143	0.049	0.005
3	BPHTB	0.778	0.079	0.000

Vaariabel Dependen : PAD

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Berlandaskan tabel 4.6 tersebut, maka diperoleh persamaan regresi seperti dibawah ini :

$$Y = 1{,}387 + 0{,}143X1 + 0{,}778X2 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PAD

X1 = PBB-P2

X2 = BPHTB

e = Error

4.5 Hasil Uji Kelayakan Model

4.5.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji kelayakan model (uji F) menentukan apakah praktis guna menilai pengaruh gabungan (simultan) variabel independen ke dependen memakai model regresi yang sedang dipakai. Distribusi F dipakai untuk pengujian hipotesis pada ambang signifikansi α = 5% (0,05). Tabel di bawah berikut menampilkan hasil uji F.:

Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan

No	Model	Sig
1	Regression	0.00

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Hasil uji F memperlihatkan tingkat signifikansi sejumlah 0,00. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya relasi antara variabel independen serta dependen bisa dijelaskan oleh model regresi yang dipakai. Hasil pengujian memperlihatkan bahwasannya variabel dependen, PAD, dengan cara bersamaan diberikan pengaruh oleh faktor PBB-P2 serta BPHTB.

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tingginya nilai koefisien determinasi memperlihatkan bahwasannya kapasitas variabel independen guna menjelaskan variabel dependen sangat baik. Tabel di bawah berikut menampilkan temuan uji koefisien determinasi :

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

No	Adjusted R Square
1	0.932

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Nilai Adjusted R Square yang diperoleh ialah sejumlah 0,932 ataupun 93,2% berlandaskan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 di atas. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 serta BPHT dengan cara bersama-sama menyajikan pengaruh sejumlah 93,2% kepada pendapatan PAD, sedangkan sisanya sejumlah 6,8% diberikan pengaruh oleh variabel lain.

4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Analisis Data

Uji-T dipakai guna menentukan pengaruh parsial variabel independen kepada variabel dependen. Tabel berikut menampilkan hasil uji-t:

Tabel 4.11 Hasil Uji t

No	Model	B	t	Sig.
1	PBB-P2 terhadap PAD	0.143	2.934	0.005
2	BPHTB terhadap PAD	0.778	9.815	0.000

Sumber : Data *Output* SPSS, 2025

Berlandaskan hasil uji T pada tabel 4.8 di atas memperlihatkan hasil seperti dibawah ini :

1. Hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien PBB-P2 sejumlah 0,143 serta nilai signifikansi sejumlah 0,005. Dengan demikian, PBB-P2 memegang pengaruh signifikan serta positif kepada penerimaan PAD. Dengan demikian, hipotesis pertama bahwasannya PBB-2 mengoptimalkan penerimaan PAD diterima.
2. Berlandaskan hasil pengujian, nilai signifikansi sejumlah 0,001 serta nilai koefisien BPHTB sejumlah 0,778. Dengan demikian, BPHTB memegang pengaruh signifikan serta positif kepada penerimaan PAD. Dengan demikian, hipotesis kedua bahwasannya BPHTB mengoptimalkan penerimaan PAD diterima.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah bisa diberikan pengaruh oleh penerimaan pajak daerah, pada penelitian berikut ada dua pajak daerah yang diteliti oleh penulis yakni PBB-P2 serta BPHTB. Berikut penjabaran hasil penelitian yang dilaksanakan :

4.7.1 Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 dengan cara signifikan serta positif memberikan pengaruh pendapatan PAD. Dengan mempertimbangkan semua hal, hal berikut menyajikan kredibilitas pada teori kerja penelitian tersebut.

Tujuan desentralisasi fiskal ialah guna mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, itulah sebabnya hasil positif berikut diharapkan. Dengan kewenangan berikut, pemerintah daerah bisa merespons kebutuhan lokal dengan cara lebih tepat, termasuk pada hal pengelolaan PBB-P2.

Pengaruh positif PBB-P2 kepada PAD bisa dijelaskan lewat beberapa faktor. Pertama, PBB-P2 ialah satu diantara jenis pajak yang mempunyai basis pajak yang cukup besar yakni seluruh bumi serta bangunan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hal berikut menjadikan PBB-P2 selaku sumber pendapatan potensial yang bisa menyajikan kontribusi signifikan kepada PAD. Besarnya potensi penerimaan PBB-P2 juga bisa terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan fisik serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kedua, strategi intensifikasi serta ekstensifikasi PBB-P2 oleh Kabupaten Bojonegoro bisa dinilai berhasil dalam mengoptimalkan PAD. Intensifikasi dilaksanakan lewat upaya mengoptimalkan efektivitas pemungutan pajak, seperti pembaruan data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penegakan hukum kepada wajib pajak yang lalai. Sementara itu, ekstensifikasi dilaksanakan dengan memperluas basis pajak, misalnya lewat identifikasi serta pendaftaran objek pajak baru yang sebelumnya belum tercatat. Kombinasi kedua strategi berikut sudah berhasil mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB-P2, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PAD.

Ketiga, dukungan regulasi serta kebijakan pemerintah daerah juga turut memberikan pengaruh peningkatan penerimaan PBB-P2. Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan

berbagai kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan PBB-P2, seperti penyederhanaan proses administrasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemungutan pajak, serta peningkatan transparansi pada pengelolaan pajak. Kebijakan-kebijakan berikut tak hanya memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mengoptimalkan kepercayaan masyarakat kepada sistem perpajakan daerah. Selain itu, faktor lain yang turut mendukung ialah peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. lewat sosialisasi yang intensif serta edukasi mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, masyarakat menjadi lebih memahami tanggung jawabnya selaku wajib pajak. Hal berikut berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan penerimaan PBB-P2.

Hasil penelitian berikut konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasannya PBB-P2 mempunyai kontribusi yang signifikan kepada PAD. Misalnya, penelitian oleh Maulana & Yasin (2024) yang memperlihatkan pengaruh PBB-P2 yang positif kepada PAD di Kabupaten Sumenep. Begitu pun dengan peneltian oleh Sugiarti (2021) yang memperlihatkan PBB-P2 memegang pengaruh positif kepada PAD Kota Palembang. Selain itu, penelitian oleh Rufaidah & Muharom (2022) serta Sobri (2018) juga memperlihatkan bahwasannya PBB-P2 memegang pengaruh signifikan kepada PAD di Kota Bandung serta Kota Cilegon. Adapun penelitian lain seperti yang dilaksanakan oleh Yanti & Suhono (2024)

memperlihatkan hasil berbeda yakni PBB-P2 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta memegang pengaruh negatif kepada PAD.

Namun, meskipun PBB-P2 memegang pengaruh positif kepada PAD di Kabupaten Bojonegoro, ada beberapa tantangan yang mungkin menghambat potensi maksimal dari kontribusi PBB-P2. Misalnya, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah bisa menyebabkan disparitas pada penerimaan PBB-P2. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak serta keterbatasan sumber daya manusia pada pengelolaan pajak juga bisa menjadi faktor penghambat.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu terus melaksanakan inovasi serta perbaikan pada sistem pemungutan PBB-P2, seperti peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pemungutan, serta penegakan hukum kepada wajib pajak yang tak patuh. Dengan demikian, kontribusi PBB-P2 kepada PAD bisa dioptimalkan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

4.7.2 Pengaruh BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Temuan penelitian memperlihatkan bahwasannya BPHTB berdampak positif serta signifikan kepada pendapatan PAD. Hal berikut memperkuat hipotesis awal penelitian, yang bisa diterima.

Sama halnya dengan PBB-P2, hasil yang positif kepada penerimaan BPHTB memperlihatkan bahwasannya pemerintah daerah bisa merespons kebutuhan lokal

dengan cara lebih tepat, sehingga mampu memperkuat basis pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh positif BPHTB kepada PAD bisa dijelaskan lewat beberapa faktor.

Pertama, aktivitas transaksi properti yang tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Setiap terjadi transaksi jual-beli, hibah, ataupun perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, pemerintah daerah berhak memungut BPHTB. Dengan demikian, tingginya aktivitas transaksi properti di sebuah daerah akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan BPHTB.

Kedua, digitalisasi sistem pemungutan BPHTB juga turut memberikan pengaruh peningkatan penerimaan BPHTB. Digitalisasi tersebut bisa membantu mendorong penyederhanaan proses administrasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemungutan pajak, serta peningkatan transparansi pada pengelolaan pajak. Kebijakan-kebijakan berikut tak hanya memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mengoptimalkan kepercayaan masyarakat kepada sistem perpajakan daerah. Kombinasi antara aktivitas transaksi yang tinggi serta sistem yang sudah terdigitalisasi menciptakan sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan penerimaan BPHTB. Kontribusi positif BPHTB kepada PAD berikut memperlihatkan bahwasannya pajak daerah, terkhususnya BPHTB, mempunyai peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasannya BPHTB mempunyai kontribusi yang signifikan kepada

PAD. Beberapa penelitian terdahulu oleh Maulana & Yasin (2024), memperlihatkan BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD di Kabupaten Sumenep. Hasil tersebut serupa dengan penelitian oleh Sugiarti (2021) yang memperlihatkan bahwasannya BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD Kota Palembang. Penelitian oleh Cahyadi, Atmadja, & Darmawan (2023) juga memperlihatkan BPHTB memegang pengaruh positif kepada PAD saat pandemi covid-19 tahun di Kota Denpasar. Namun, temuan berikut tak sejalan dengan penelitian oleh Tala, Sumual, & Rawung (2024) yang memperlihatkan bahwasannya BPHTB tak memegang pengaruh pada PAD di Kota Tomohon.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ialah sejumlah kesimpulan yang dapat diperoleh berlandaskan hasil analisa Pengaruh PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Bojonegoro:

(1) PBB-P2 memegang pengaruh positif serta signifikan kepada PAD. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya peningkatan penerimaan PBB-P2 bisa mendorong pertumbuhan PAD, sehingga hipotesis pertama diterima.

(2) BPHTB juga memegang pengaruh positif serta signifikan kepada PAD. Temuan berikut mendukung hipotesis kedua serta sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, di mana pajak properti berperan penting dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, kedua variabel (PBB-P2 serta BPHTB) ialah sumber penerimaan yang efektif dalam mendukung PAD di Kabupaten Bojonegoro.

5.2 Implikasi

Implikasi yang bisa ditarik dari kajian berikut berlandaskan temuan analisis, pembahasan, serta simpulan di atas:

1) Bagi penelitian selanjutnya

   (1) Penelitian berikut menyajikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan properti serta desentralisasi fiskal, terkhususnya terkait peran PBB-P2 serta BPHTB dalam mengoptimalkan PAD.

   (2) Hasil penelitian bisa menjadi referensi bagi akademisi ataupun peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan studi serupa dengan menambah variabel ataupun metode analisis yang lebih komprehensif.

2) Bagi Pemerintah

   Bagi Pemerintah Daerah, penelitian berikut menjadi dasar guna menyusun strategi optimalisasi penerimaan PBB-P2 serta BPHTB, seperti mengoptimalkan efektivitas pemungutan, memperluas basis pajak, ataupun sosialisasi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian berikut mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain:

1) Penelitian tak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang bisa memberikan pengaruh penerimaan PAD dengan cara signifikan.

2) Penelitian hanya berfokus pada PBB-P2 serta BPHTB, belum mencakup jenis pajak daerah lainnya.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Temuan pada penelitian berikut menyisakan beberapa pertanyaan yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Guna memperkaya pemahaman terkait dinamika pajak daerah, penelitian berikutnya bisa memasukkan faktor-faktor makroekonomi ain yang mungkin memberikan pengaruh PAD, seperti inflasi, kebijakan insentif pajak, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, penelitian berikut juga bisa menganalisis dampak jenis pajak daerah lainnya kepada PAD. Sehingga, hasil penelitian tersebut bisa memperkaya referensi pemerintah daerah pada penentuan langkah strategis pada kebijakan fiskal daerah.

Dengan memperluas cakupan penelitian semacam berikut, bisa dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik guna menyeimbangkan target fiskal serta pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan-temuan berikut diharapkan bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan penguatan PAD yang lebih terukur, baik di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anasti, R., Anasta, L., Harnovinsah, & Oktris, L. (2022). *Sukses Menyelesaikan Skripsi dengan Metode Penelitian Kuantitatif dan Analisis Data SPSS.* Salemba Empat.

Badan Pusat Statistik. (2024, Februari 23). *Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VWtsTFNuRlpabk16TWxKaVNXcE1PRXhKT0RJclFUMDkjMw==/produk-domestik-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha--miliar-rupiah---2022.html?year=2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024, Februari 28). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah) Kabupaten Bojonegoro*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro: https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQjMg==/pdrb-atas-dasar-harga-konstan.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2024). *Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi Menurut Jenis Pendapatan*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi: https://ngawikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzI4IzI=/realisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-ngawi-menurut-jenis-pendapatan.html.

Cahyadi, D., Atmadja, A. T., & Darmawan , N. A. (2023). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol : 14 No : 03)*.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Realisasi Pajak Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Keuangan.

Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan? *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.12 Mei 2022*.

Ghozali, I. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Realita.* Bogor: In Media.

Hidayat, A. (2013). *Transformasi Data*. Retrieved from Statistikian: https://www.statistikian.com/2013/01/transformasi-data.html

Huang, Z., Zhao, T., Lai, R., Tian, Y., & Yang, F. (2023). A comprehensive implementation of the log, Box-Cox and log-sinh transformations for skewed and censored precipitation data. *Journal of Hydrology Volume 620*.

Irwansyah, N., Azis, N., & Hidayat, R. (2024). *Metode Penelitian.* Bandung: Luana Publishing House.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Peningkatan Local Taxing Power Edisi XXVI.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Percepatan Konvergensi Ekonomi Daerah melalui Penguatan Kerja Sama antar Daerah.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Media Komunikasi dan Informasi Desentralisasi Fiskal Edisi XXXVII.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kinanti, A., & Putra, A. (2024). Pengaruh NPL, LDR, dan CAR terhadap ROA pada Bank Umum Konvensional. *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 8 Nomor 1*, 16482-16493.

Kuara, W., & Nasution, M. P. (2020). Analisis Keputusan Pembelian Konsumen dalam Membeli Minyak Goreng Merek Sunco. *Agriprimatech*, 7-15.

Kurniati, D. (2024, November 15). *Lifting Migas Rendah, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Penerimaan*. Retrieved from DDTC News: Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Lifting Migas Rendah, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Penerimaan". Baca selengkapnya: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806898/lifting-migas-rendah-sri-mulyani-singgung-dampaknya-ke-penerimaan.

Maulana, N. W., & Yasin, M. (2024). Pengaruh Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sumenep. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2(2)*, 237-250.

Moisiu, A. (2013). Decentralization and The Increased Autonomy in Local Governments. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (pp. 459-463).

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol 2 No 1*, 30-45.

Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Pajak Daerah*. Retrieved from Satu Data Bojonegoro: https://data.bojonegorokab.go.id/badan-pendapatan-daerah.html

Pemerintah Kabupaten Jombang. (2023, Januari 25). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang*. Retrieved from Bapenda Kabupaten Jombang: https://bapenda.jombangkab.go.id/web/file-upload/LKjIP2022_BAPENDA_UPDATE.pdf

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2022). *Informasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Tuban: https://tubankab.go.id/files/Transparansi%20Anggaran/TA%202022/11-informasi-realisasi-pendapatan-daerah-tahun-2022.pdf.

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2023). *Informasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023.* Retrieved from Pemerintah Kabupaten Tuban: https://tubankab.go.id/files/Transparansi%20Anggaran/Tahun%202023/11-12-13-informasi-realisasi-pendapatan-daerah-tahun-2023.pdf.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rahman, M. A. (2020). Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol 3(1)*, 55-68.

Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financia, 3(1)*.

Sobri, A. F. (2018). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016 (Studi BPKAD Kota Cilegon).* Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

Sugiarti. (2021). *Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang: Universitas Tridinanti Palembang.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung.* Bandung: Alfabet.

Tala, O. Y., Sumual, F. M., & Rawung, L. T. (2024). Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jambura Accounting Review, Volume 5 No. 2*, 119 – 131.

Yanti, P. F., & Suhono. (2024). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2024, 10 (5)*, 701-709.

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.

Zakaria, S., & Hasna, O. (2014). Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Regional di Kawasan Timur Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014, Volume I* (pp. 15-28). Ambon: Universitas Darussalam Ambon.